

2025

**LAPORAN
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAERAH
(LKj.IP)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Jl. Walanda Maramis No. 09 Pacitan

Tlp./ Fax : (0357) 886164

Email : bpbd@pacitankab.go.id

Website : <https://bpbd.pacitankab.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji Syukur selalu kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya semata, sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025.

Laporan ini memuat gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sebagai penjabaran dari visi dan misi, yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Kami berharap laporan ini dapat bermanfaat, khususnya bagi bahan pendukung LKj.IP Bupati Pacitan tahun 2025.

Pacitan, 20 Februari 2026

Kepala Pelaksana BPBD

Kabupaten Pacitan



ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19790308 199711 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pacitan Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis BPBD Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2025. Penyusunan LKj.IP BPBD Tahun 2025 ini pada hakekatnya merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2025.

Dalam upaya pelayanan penanggulangan bencana, BPBD telah melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta untuk mendukung visi dan misi Bupati Pacitan yang telah dituangkan dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2021-2026.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan BPBD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai pada tahun mendatang, yaitu sebagai berikut :

- Tujuan 1 : Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang inovatif, Profesional dan Responsif.
- Tujuan 2 : Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah Terhadap Resiko Bencana.

BPBD mendapatkan alokasi dana tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 4.286.555.243,00 (Empat Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.143.473.974,00 (Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Melalui LKj.IP BPBD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan dan sasaran strategis Rencana Strategis BPBD Tahun 2021-2026.

DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	<i>i</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF	<i>ii</i>
DAFTAR ISI	<i>iv</i>
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	3
C. ISU STRATEGIS	9
D. CASCADING KINERJA (KETERKAITAN DENGAN RPJMD)	9
E. PETA PROSES BISNIS	11
F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	30
1. PERBANDINGAN TARGET DAN REALISASI KINERJA	30
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	33
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET RPJMD/RENSTRA	34
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI KINERJA BPBD KABUPATEN LAIN (BENCHMARK KINERJA)	34
5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/ KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/ PENURUNAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN	35
6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	37
7. ANALISIS PROGRAM/ KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	41
8. REALISASI ANGGARAN	43
BAB IV PENUTUP	47
LAMPIRAN	49

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) tahun anggaran 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Kabupaten Pacitan terletak di Provinsi Jawa Timur diantara 110°56' – 111°25' Bujur Timur dan 07°55' – 08°17' Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.389,87 Km² atau 138.987,16 Ha. Dari luasan wilayah tersebut sebagian besar berupa bukit, gunung dan jurang terjal dan termasuk jajaran pegunungan seribu (*Ring of Fire*). Secara administratif Kabupaten Pacitan terbagi dalam 12 wilayah kecamatan, 5 kelurahan dan 167 desa.

Dikarenakan kondisi demografis alam yang seperti itu, maka potensi bencana yang rawan terjadi dengan skala prioritas adalah sebagai berikut :

- a. Tanah longsor/gerakan tanah;
- b. Banjir;
- c. Kekeringan;
- d. Angin kencang;
- e. Gempa bumi;
- f. Gelombang pasang dan tsunami;
- g. Cuaca ekstrim

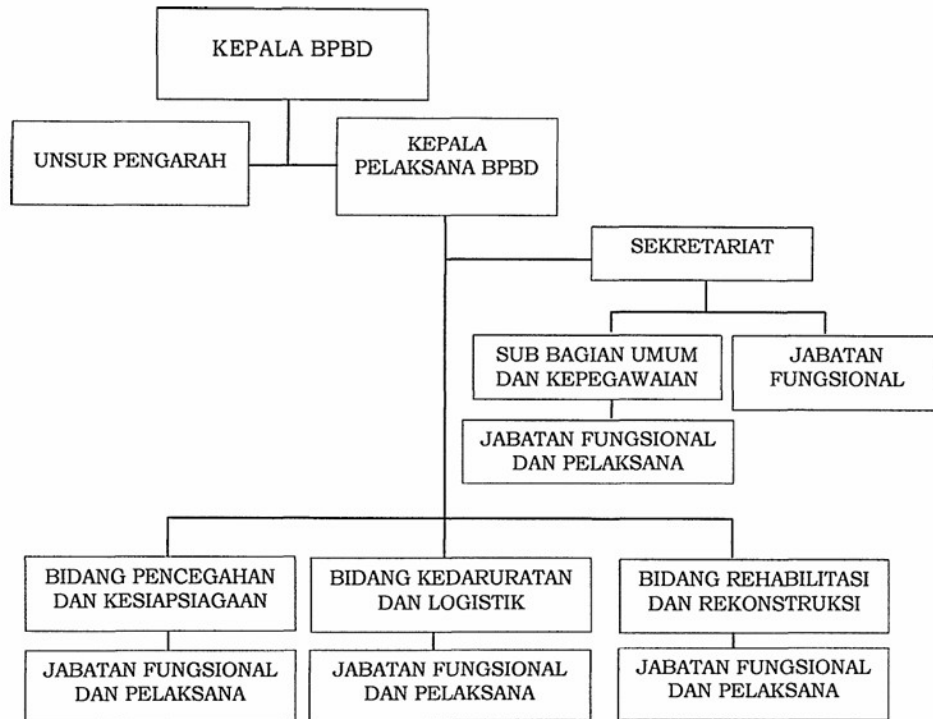
Salah satu komitmen Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk pelayanan pada masyarakat di bidang penanggulangan bencana adalah dengan terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun

2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, yang personilnya telah diisi mulai tanggal 15 Maret 2012. Dan telah di perbaharui dengan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4. Bidang Kedaruratan dan logistik
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat pada gambar struktur organisasi berikut :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 131 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan perundang-undangan;

3. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yaitu :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah,
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah,

- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah,
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana penanggulangan Bencana di Daerah, dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan bencana, tugas dan fungsi unsur pengarah;
- e. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Umum dan kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan anggaran;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program kegiatan;
- c. Menyusun bahan dan melaksanakan upaya peningkatan pelayanan publik;
- d. Menghimpun dan menyiapkan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar pelaksanaan program kerja dan kegiatan;
- e. Melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan;
- f. Menyelenggarakan pelayanan administrasi, kehumasan dan keprotokolan;
- g. Melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat kedinasan;
- h. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dinas;
- i. Melaksanakan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang dinas;
- j. Melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan tatalaksana;
- k. Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- l. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- b. Pengekoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;

- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai tugas dan fungsinya.

C. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang akan dikembangkan dalam Upaya penanggulangan bencana adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan penanggulangan bencana terarah, terkoordinasi, terpadu dan menyeluruh serta akuntabel
2. Peningkatan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana
3. Penanganan kedaruratan korban bencana di wilayah pascabencana secara cepat, tepat dan efektif, terkoordinir dan terpadu
4. Pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pasca bencana secara terpadu dan menyeluruh.

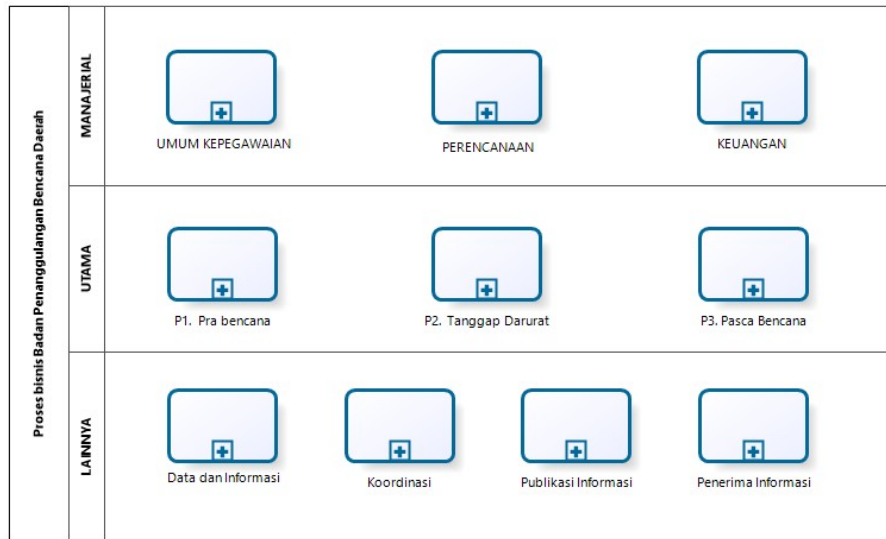
D. CASCADING KINERJA (KETERKAITAN DENGAN RPJMD)

Keselarsan kerangka pembangunan misi 2 RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan disajikan melalui *Cascading* berikut :



Perumusan tujuan dan sasaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan mendukung misi ke 2 (dua) yaitu **“Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa”**.

E. PETA PROSES BISNIS



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 oleh Inspektorat, memperoleh nilai sebesar 77,50 dengan kategori BB (sangat baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1. Tabel Penilaian AKIP
di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
a.	Perencanaan Kinerja	30%	23,70
b.	Pengukuran Kinerja	30%	21,60
c.	Pelaporan Kinerja	15%	11,70
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	20,50
Jumlah		100%	77,50

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK OPD TAHUN 2021-2026

1. VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut dan sesuai dengan Visi Pemerintah Kabupaten Pacitan 2021-2026, maka visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten adalah :

**“TERWUJUDNYA PENANGGULANGAN BENCANA
SECARA CEPAT, TEPAT, TERENCANA, TERKOORDINASI DAN
TERPADU”**

Diharapkan dengan terumuskannya visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen Dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

2. MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi, maka misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengendalian terhadap program, Administrasi, sumber daya manusia dan sarana prasarana aparatur.

2. Melaksanakan peningkatan kapasitas lembaga dan masyarakat dalam kesiapsiagaan serta pengurangan resiko bencana.
3. Melaksanakan sistem penanggulangan bencana yang efektif dan efisien secara terencana, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Melaksanakan peningkatan kapasitas perencanaan dalam pemulihan.

3. TUJUAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. Kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun tujuan dalam rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatnya Kesiapsiagaan Daerah Terhadap Risiko Bencana
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif, Profesional dan Responsif

4. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jangka waktu tahunan, sampai lima tahun mendatang.

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART”. Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas. Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*specific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*). Sasaran dan indikator di dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal
Indikator : Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah
2. Penguatan daerah dalam pengurangan risiko bencana
Indikator : Indeks Ketahanan Daerah

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan selaras dengan Tujuan dan Sasaran pada Misi ke-2 dari RPJMD 2021-2026 Kabupaten Pacitan yaitu Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia, serta Sasaran yang dicapai yaitu Meningkatnya kebahagiaan masyarakat.

Tabel 2.1. Keselarasan RPJMD Kab. Pacitan dengan
Renstra BPBD Kab. Pacitan 2021-2026

KABUPATEN				
Misi ke-2	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Mewujudkan pembangunan dan peningkatan daya saing SDM yang kukuh berpijak pada nilai-nilai budaya bangsa	Meningkatnya daya saing sumber daya manusia yang berbudaya dan bahagia	Indeks pembangunan manusia	Meningkatnya kebahagiaan masyarakat	Indeks kebahagiaan

BPBD					
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Rumus Perhitungan Indikator	Program	Indikator Kinerja Program
Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang inovatif, Profesional dan Responsif	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	Perumusan dan Penilaian dari penghitungan hasil e-Sukma	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Hasil nilai SAKIP PD
Meningkatnya kesiapsiagaan daerah terhadap resiko bencana	Penguatan daerah dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Perumusan dan Penilaian dari BPBD Prov. Jawa Timur	Program Penanggulangan Bencana	Nilai pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik

Dari tabel diatas dapat dilihat keterkaitan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dengan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021 – 2026 adalah pada misi ke 2 yaitu : Mewujudkan Pembangunan Dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa.

5. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pacitan dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

6. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Program Penanggulangan Bencana
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - 1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - 1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - 3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota
 - 4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam
 - 5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
 - 6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - 7) Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota
 - 8) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
 - 9) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 10) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - 1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
 - 2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - 1) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - 3) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana R3P Kab/Kota

B. RENCANA KINERJA OPD TAHUN 2025

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, antara lain indikator kinerja sasaran dan target capaiannya.

Dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dijabarkan mengenai rencana kegiatan dan target kinerja yang telah

menjadi komitmen organisasi untuk dicapai dalam tahun 2025 dengan 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran. Sedangkan program, kegiatan dan subkegiatan yang tertuang dalam rencana kinerja tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan
Tahun 2025**

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					
								Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Sumber Dana
								Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
1	2					3	4	8	9	10	11	12	14
						Badan Penanggulangan Bencana Daerah				3.985.822.830,00	4.336.822.830,00	4.286.555.243,00	
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				3.985.822.830,00	4.336.822.830,00	4.286.555.243,00	
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3.985.822.830,00	4.336.822.830,00	4.286.555.243,00	
1	1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	76,05	76,05	2.644.602.830,00	2.788.602.830,00	2.584.206.215,00	
	1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja perangkat daerah	24 dokumen	24 dokumen	11.240.000,00	46.240.000,00	46.240.000,00	
	1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	5.620.000,00	40.620.000,00	40.620.000,00	Pajak Rokok
	1	05	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15 Laporan	15 Laporan	5.620.000,00	5.620.000,00	5.620.000,00	Pajak Rokok
	1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan perangkat daerah	57 dokumen	57 dokumen	1.789.222.830,00	1.735.222.830,00	1.735.222.830,00	
	1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Orang/bulan	16 Orang/bulan	1.738.282.830,00	1.684.282.830,00	1.539.960.370,00	Dana Alokasi Umum (DAU)

	1	05	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	42.540.000,00	42.540.000,00	42.540.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	45 Laporan	45 Laporan	8.400.000,00	8.400.000,00	8.400.000,00	Pajak Rokok	
	1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	100 %	100 %	104.849.220,00	126.029.220,00	126.029.220,00	
	1	05	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
						Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	104.849.220,00	126.029.220,00	23.517.459,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase operasional dasar perangkat daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	234.406.135,00	244.060.768,00	244.060.768,00	
	1	05	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	66.977.359,00	66.127.876,00	92.218.128,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1	05	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	41.938.776,00	41.937.892,00	45.437.722,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	
	1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	13 Laporan	125.490.000,00	135.995.000,00	69.995.000,00	Pajak Rokok	

	1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang operasional perangkat daerah yang dibutuhkan	100 %	100 %	279.018.965,00	411.934.332,00	411.934.332,00	
	1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	93.714.965,00	248.830.332,00	219.519.427,00	Pajak Rokok
	1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	185.304.000,00	163.104.000,00	215.520.000,00	Pendapatan Transfer Antar Daerah
	1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	225.865.680,00	225.115.680,00	225.115.680,00	
	1	05	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	17 Unit	17 Unit	84.028.145,00	83.278.145,00	104.418.109,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
	1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit	14 Unit	9.460.000,00	9.460.000,00	9.460.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok
	1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	132.377.535,00	132.377.535,00	166.980.000,00	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
2	1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Nilai pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik	0,81 Nilai	0,81 Nilai	1.341.220.000,00	1.548.220.000,00	1.702.349.028,00	
	1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	100 %	135.000.000,00	135.000.000,00	167.572.387,00	

	1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)							
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	210 Orang	12.239 Orang	135.000.000,00	135.000.000,00	167.572.387,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %	819.269.400,00	853.596.300,00	929.206.099,00	
	1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1.000.000,00	1.000.000,00	814.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	50 Unit	24 Unit	10.087.125,00	10.087.125,00	10.351.180,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota							
						Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	300 Orang	300 Orang	1.000.000,00	1.000.000,00	814.600,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam							
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	125 Keluarga	50 Keluarga	15.000.000,00	15.000.000,00	10.609.800,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	

1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana							
					Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	6 Kawasan	6 Kawasan	277.120.000,00	277.120.000,00	226.952.304,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	20 Orang	20 Orang	3.000.000,00	3.000.000,00	1.080.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota							
					Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	93.843.806,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana							
					Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	1.000.000,00	687.636,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota							
					Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	1 laporan	1 laporan	356.062.275,00	390.389.175,00	551.808.824,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota							

						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1 Kawasan	1 Kawasan	50.000.000,00	50.000.000,00	32.243.349,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	95 %	95 %	131.750.600,00	97.423.700,00	182.613.580,00	
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas							
						Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan	1 Laporan	1.600.000,00	800.000,00	320.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	1 Dokumen	63.520.000,00	41.440.000,00	31.904.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 Orang	1 Orang	13.900.000,00	7.122.000,00	4.562.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	220 Orang	90 Orang	47.130.600,00	42.461.700,00	143.267.580,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	5.600.000,00	5.600.000,00	2.560.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen dasar penanggulangan bencana	1 dokumen	1 dokumen	255.200.000,00	462.200.000,00	422.956.962,00	

	1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	27 Orang	22 Orang	128.490.000,00	125.210.000,00	88.688.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota							
						Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	1 Kegiatan	25 Kegiatan	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
	1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota							
						Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	126.710.000,00	136.990.000,00	134.268.962,00	Dana Alokasi Umum (DAU)	
									J U M L A H	3.985.822.830,00	4.336.822.830,00	4.286.555.243,00	

C. PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang telah disepakati antara yang menerima tugas dan yang bertanggung jawab.

Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri dari sasaran strategis, indikator kinerja, program kegiatan beserta target capaiannya diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	90	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.584.206.215
			a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 46.240.000
			1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 40.620.000
			2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 5.620.000
			b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.590.900.370
			1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 1.539.960.370
			2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 42.540.000
			3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Rp. 8.400.000
			c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 23.517.459
			1) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Rp. 23.517.459
			d. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 207.650.850
			1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 92.218.128
			2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 45.437.722
3) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 69.995.000			

			<p>e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp. 223.019.427</p> <p>2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp. 215.520.000</p> <p>f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp. 100.918.109</p> <p>2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp. 9.460.000</p> <p>3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp. 166.980.000</p>	<p>Rp. 438.539.427</p> <p>Rp. 277.358.109</p>
Penguatan daerah dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	<p>2. Program Penanggulangan Bencana</p> <p>a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana) Rp. 167.572.387</p> <p>b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>1) Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota Rp. 814.600</p> <p>2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Rp. 10.351.180</p> <p>3) Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota Rp. 814.600</p> <p>4) Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam Rp. 10.609.800</p> <p>5) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Rp. 226.952.304</p> <p>6) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/ Kota Rp. 1.080.000</p> <p>7) Penyusunan Rencana Kontijensi Rp. 93.843.806</p> <p>8) Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana Rp. 687.636</p> <p>9) Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota Rp. 551.808.824</p>	<p>Rp. 1.702.349.028</p> <p>Rp. 167.572.387</p> <p>Rp. 929.206.099</p>

			10) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	32.243.349
			c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp.	182.613.580
			1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Rp.	320.000
			2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Rp.	31.904.000
			3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	4.562.000
			4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	143.267.580
			5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Rp.	2.560.000
			d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp.	422.956.962
			1) Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Rp.	88.688.000
			2) Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp.	200.000.000
			3) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Rp.	134.268.962

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja sebagai suatu pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah yang harus dapat menjawab mengenai hal-hal yang memerlukan jawaban. Analisis pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan merupakan hasil evaluasi secara komprehensif terhadap kinerja, termasuk hasil analisis dan evaluasi terhadap perencanaan strategik, akuntabilitas kinerja, aspek keuangan dan lain-lain.

Oleh karena itu, suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat keberhasilan/ kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indikator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran dan penilaian kinerja, tetapi juga harus menyajikan data dan informasi relevan lainnya bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/ kegagalan tersebut secara luas dan mendalam.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2025

BPBD Kabupaten Pacitan mempunyai 2 sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran serta telah ditetapkan target kinerjanya. Pengukuran capaian target kinerja dilakukan dengan menghitung persentase realisasi.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Tabel 3.1. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	
1.	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	90	90	100%
2.	Penguatan daerah dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,72	101,40%

Dari tabel perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2025 diatas, sasaran terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal diukur melalui indikator sasaran **Hasil Nilai IKM PD** dengan nilai realisasi 90.

Capaian tersebut diperoleh dari hasil pengumpulan data dari pengguna/penerima layanan sebanyak 188 responden dengan rincian dan klasifikasi sebagai berikut :

Tabel 3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	118
		Perempuan	70
Jumlah			188

Berdasarkan klasifikasi jenis kelamin dari 188 responden terdapat 118 responden berjenis kelamin laki-laki, serta 70 responden perempuan.

Tabel 3.3. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No	Karakteristik	Indikator	Jumlah
1.	Usia	17 s/d 30	73
		31 s/d 50	89
		>51	26
Jumlah			188

Berdasarkan klasifikasi usia dari 188 responden terdapat 73 responden berusia 17 tahun sampai dengan 30 tahun, 89 responden berusia 31 tahun sampai dengan 50 tahun, serta 26 responden berusia lebih dari 51 tahun.

Dari responden tersebut dilakukan analisa data yang dilakukan berdasarkan pengukuran unsur pelayanan melalui aplikasi e-Sukma, sehingga diperoleh pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.4. Pengukuran Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1.	Kesesuaian persyaratan	3,57
2.	Prosedur Pelayanan	3,53
3.	Kecepatan Pelayanan	3,45
4.	Biaya pelayanan	3,86
5.	Jenis pelayanan	3,51
6.	Kemampuan petugas pelayanan	3,61
7.	Sikap dan perilaku petugas	3,61
8.	Penanganan pengaduan	3,85
9.	Kualitas sarana dan prasarana	3,51
10.	Transparansi Pelayanan	3,66
11.	Integritas Petugas Pelayanan	3,72
Nilai Rata-rata tertimbang		3,60
Nilai Konversi IKM		90 (Sangat Baik)

Rentang nilai mutu pelayanan :

- A (Sangat Baik) : 88,31 - 100
- B (Baik) : 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) : 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) : 25,00 - 64,99

Dari tabel tersebut diketahui bahwa mutu pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 memperoleh nilai dengan kategori **Sangat Baik**.

Sedangkan sasaran Penguatan daerah dalam pengurangan resiko bencana diukur melalui indikator sasaran **Indeks Ketahanan Daerah** dengan nilai realisasi sebesar 0,72.

Capaian tersebut diperoleh dari hasil penghitungan 7 (tujuh) parameter sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah

No	Parameter	Nilai
1.	Penguatan kebijakan dan kelembagaan	0,92
2.	Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	0,90
3.	Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik	0,92
4.	Penanganan tematik kawasan rawan bencana	0,78
5.	Peningkatan efektifitas pencegahan dan mitigasi bencana	0,64
6.	Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana	0,61
7.	Pengembangan sistem pemulihan bencana	0,80
Nilai Indeks Ketahanan Daerah		0,72 (sedang)

Nilai Indeks Ketahanan Daerah memiliki rentang nilai 0-1 dengan pembagian tingkat ketahanan daerah sebagai berikut :

- Indeks $\geq 0,4$ adalah rendah
- Indeks 0,41-0,8 adalah sedang
- Indeks 0,81-1 adalah tinggi

Dari tabel diatas diketahui bahwa nilai Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2025 menunjukkan tingkat nilai kapasitas daerah **Sedang**, yang berarti semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah maka risiko bencana menjadi berkurang.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.

Tabel 3.6. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi					
			Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	90	76,89	80,85	80	84,91	86,20	90
Penguatan daerah dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,55	0,66	0,71	0,71	0,71	0,72

Dari tabel perbandingan capaian kinerja tersebut terlihat ada indikator yang meningkat dan tetap dibanding dengan capaian kinerja tahun lalu.

Untuk indikator kinerja Hasil Nilai IKM tahun 2025 mengalami kenaikan dibanding dengan nilai tahun 2024 yaitu senilai 90. Hal ini disebabkan meningkatnya penilaian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Sedangkan untuk indikator Indeks Ketahanan Daerah pada tahun 2025 mengalami kenaikan menjadi 0,72. Hal ini disebabkan adanya nilai indeks prioritas sebagai pendukung penghitungan IKD mengalami peningkatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan target RPJMD/ Renstra

Tabel 3.7. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Target RPJMD/ Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ Renstra	Realisasi 2025	Tingkat Kemajuan
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	90	90	100%
Penguatan daerah dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	0,71	0,72	101%

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target RPJMD/ Renstra terlihat tingkat kemajuan indikator capaian kinerja yang sudah mencapai target dan melebihi target.

Untuk indikator kinerja Hasil Nilai IKM tahun 2025 mencapai target dengan tingkat kemajuan 100% dari target akhir RPJMD/Renstra. Sedangkan untuk indikator kinerja Indeks Ketahanan Daerah tahun 2025 nilai melebihi target dengan tingkat kemajuan mencapai 101% dari target akhir RPJMD/ Renstra.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten lain di Jawa Timur (*Benchmark Kinerja*)

Untuk mengukur perbandingan kinerja BPBD Kabupaten Pacitan dengan beberapa BPBD Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dapat menggunakan pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Dari hasil perhitungan IKD pada tahun 2025 se Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur diperoleh rekapitulasi sebagai berikut :

Tabel 3.8. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja BPBD Kabupaten lain di Provinsi di Jawa Timur (*Benchmark Kinerja*)

No	Kabupaten/ Kota	Nilai IKD	Kelas IKD
1.	Pacitan	0,72	Sedang
2.	Ponorogo	0,56	Sedang
3.	Trenggalek	0,69	Sedang
4.	Tulungagung	0,65	Sedang
5.	Kab. Blitar	0,65	Sedang
6.	Kediri	0,69	Sedang

Dari data diatas, diketahui bahwa nilai IKD Kabupaten Pacitan memperoleh nilai 0,72. Nilai IKD 0,72 tersebut menunjukkan Kabupaten Pacitan berada pada kategori kelas sedang, yang berarti masih perlu ditingkatkan supaya lebih kuat dan responsif terhadap ancaman bencana.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Dari hasil capaian kinerja menunjukkan tingkat pencapaian sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025, yang diukur melalui pencapaian target indikator kinerja. Dari dua indikator yang di tetapkan pada tahun 2025, sebanyak 2 indikator kinerja dapat dicapai dengan baik.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang perubahan klasifikasi tipe Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan menjadi tipe A.
2. Adanya kajian risiko bencana yang memetakan potensi bencana, kerentanan dan kapasitas daerah.
3. Terbentuknya masyarakat sadar bencana dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang diberikan melalui sekolah, organisasi masyarakat, pemerintah daerah, perusahaan BUMN/ Swasta.
4. Dukungan dari pemerintah pusat, provinsi serta CSR dalam melaksanakan program-program kegiatan.
5. Keberhasilan evakuasi bencana yang didukung dengan peralatan perlindungan diri yang ada untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban.
6. Tersedianya sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat.
7. Penyaluran bantuan kepada korban bencana secara cepat dan tepat sesuai sasaran.
8. Peningkatan kompetensi personil dan relawan baik melalui program internal maupun melalui kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat dan pihak swasta.

Selain faktor pendukung keberhasilan, terdapat juga faktor penghambat, diantaranya :

1. Cakupan wilayah serta kondisi geografis Kabupaten Pacitan yang sangat luas dan terjal sehingga membutuhkan waktu lebih untuk mencapai lokasi.
2. Sinergisitas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara pemerintah, swasta dan masyarakat belum maksimal.

3. Belum memadainya sarana dan prasarana penanganan bencana baik secara kuantitas maupun kualitas.
4. Belum terpenuhinya SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam penanggulangan bencana.
5. Belum terintegrasinya sistem informasi kebencanaan sehingga informasi yang diberikan belum akurat.

Beberapa alternatif solusi yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan dan Dinas terkait penanggulangan bencana.
 2. Melakukan sosialisasi mitigasi bencana di Desa-desa dan Sekolah.
 3. Memaksimalkan layanan pusdalops sebagai pusat data dan informasi kebencanaan.
 4. Menyebarluaskan informasi kebencanaan melalui media sosial seperti grup Whatsapp, Instagram, Facebook, Website.
 5. Mengusulkan penanganan bencana melalui BTT Kabupaten, BTT provinsi maupun ke BNPB.
 6. Mengusulkan bantuan sarpras dan logistik melalui Kabupaten maupun permohonan bantuan ke Provinsi.
6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kekuatan dan sumber daya yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

a. Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebesar Rp. 4.286.555.243,00 digunakan untuk melaksanakan 2 (dua) sasaran strategis dengan

realisasi sebesar Rp. 4.143.473.974,00. Tingkat efisiensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana berikut :

$$E = \frac{\sum((PAKi \times Cki) - RAKi)}{\sum PAKi} \times 100\%$$

Keterangan :

- E = Efisiensi
- PAKi = Pagu Anggaran
- RAKi = Realisasi Anggaran
- Cki = Capaian Kinerja

Tabel 3.9. Efisiensi Sumber Daya Anggaran Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil nilai IKM PD	2.584.206.215	100%	2.458.438.417	4,87%
Penguatan daerah dalam pengurangan resiko bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1.702.349.028	101,4%	1.685.035.557	2,42%

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan program dan kegiatan serta untuk mencapai target capaian kinerja telah efisien.

b. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 dalam mencapai sasaran adalah sebagaimana berikut :

Tabel 3.10 Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Pacitan Berdasarkan Klasifikasi Jenis Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	S2	3	0	3
2.	S1	22	11	33
3.	D3	0	0	0
4.	D2	0	2	2
5.	SLTA/SMA	21	4	23
JUMLAH		46	17	63

Tabel 3.11 Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Pacitan Berdasarkan Klasifikasi Dalam Jabatan

NO	GOLONGAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Eselon II	1	0	1
2.	Eselon III	4	0	4
3.	Eselon IV	0	1	1
4.	Staf PNS	4	2	6
5.	CPNS	1	0	1
6.	PPPK	3	1	4
7.	Non ASN	33	13	46
JUMLAH		46	17	63

Tabel 3.12. Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kab. Pacitan Berdasarkan Pangkat

NO	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	IVc	1	0	1
2.	IVb	0	0	0
3.	IVa	1	0	1
4.	IIId	2	0	2
5.	IIIf	1	1	2

NO	PANGKAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
6.	IIIb	0	0	0
7.	IIIa	4	1	5
8.	IIId	1	1	2
9.	PPPK	3	1	4
10.	NON ASN	33	13	46
JUMLAH		46	17	63

Kategori Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan Per tanggal 02 Nopember 2023 adalah setingkat Badan dengan kategori tipe A, namun pejabat definitifnya baru terisi pada tanggal 05 Januari 2024.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 08 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 07 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Pacitan. BPBD Kabupaten Pacitan diampu oleh 5 jabatan struktural. Jabatan struktural tersebut di isi personil yang terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Sekretariat melaksanakan 1 program 5 kegiatan 14 subkegiatan yang diampu oleh 1 orang Sekretaris Pelaksana, 1 Kasubbag, 2 orang ASN Pelaksana, 2 orang PPPK, serta 6 orang Non ASN. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaksanakan 2 kegiatan 8 subkegiatan yang ditangani oleh 1 orang Kepala Bidang, 1 orang ASN Pelaksana, serta 4 orang Non ASN. Seksi Kedaruratan dan Logistik melaksanakan 1 kegiatan 8 subkegiatan yang ditangani oleh 1 orang Kepala Bidang, 3 orang ASN Pelaksana, 1 orang CPNS, 1 orang PPPK serta 21 orang Non ASN. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi melaksanakan 1 kegiatan 3

subkegiatan yang ditangani oleh 1 orang Kepala Bidang, 1 Orang Kepala Bidang, serta 5 orang Non ASN. Serta Pusdalops yang di isi oleh 1 orang PPPK serta 10 orang Non ASN. Keseluruhan pegawai BPBD Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 berjumlah 63 orang.

Dengan beban kerja yang cukup berat dan mengingat kondisi demografis Kabupaten Pacitan yang memiliki potensi bencana alam yang cukup tinggi, sehingga dirasa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan masih minim dalam hal kuantitas dan kualitas pegawai administrasi dan lapangan sehingga diperlukan penambahan serta pelatihan pegawai untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang berkompeten.

7. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam Renstra maupun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Untuk hasil target dan realisasi yang telah dicapai disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.13 Capaian Program/ Kegiatan Tahun 2025

Program/ Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai sakiq PD	76,05	77,50	101%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		24 dokumen	24 dokumen	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		57 dokumen	57 dokumen	100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	100%	100%

Program/ Kegiatan	Indikator Program	Target	Realisasi	% Capaian
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	90%	90%
Program Penanggulangan Bencana	Nilai pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik	0,81	0,92	113%
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota		100%	100%	100%
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		100%	100%	100%
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		95%	95%	100%
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		1 dokumen	1 dokumen	100%

Dari tabel di atas keberhasilan pencapaian indikator kinerja didukung oleh program :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Nilai SAKIP PD, realisasi indikator tersebut sebesar 77,50 dengan persentase capaian 101% dari target. Indikator ini didukung dengan kegiatan :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dari kegiatan tersebut secara umum realisasi capaian kinerja kegiatan telah mencapai target.
2. Program Penanggulangan Bencana dengan indikator Nilai pengembangan sistem informasi, diklat, dan logistik, realisasi indikator tersebut sebesar 0,92 dengan persentase capaian 113% dari target. Nilai tersebut diperoleh melalui pemenuhan pengisian

indikator pada tools penilaian IKD (*terlampir*). Indikator ini didukung dengan kegiatan :

- a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/ Kota
- b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Dari kegiatan tersebut secara umum realisasi capaian kinerja kegiatan telah mencapai target.

8. Realisasi Anggaran

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2025 memperoleh anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp 4.286.555.243,00 dengan rincian belanja dan realisasi sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.539.960.370,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.484.910.326,00 atau 96,42%.
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 2.498.707.750,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.412.575.916,00 atau 96,55%
- Belanja Modal sebesar Rp. 247.887.123,00,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 245.987.732,00 atau 99,23%.

Realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi tahun 2025 sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3.14. Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2025**

No	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
	BELANJA DAERAH	4.286.555.243	4.143.473.974	96,66%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.584.206.215	2.458.438.417	95,13%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	46.240.000	46.148.700	99,80%

No	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Perangkat Daerah				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	40.620.000	40.533.000	99,79%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.620.000	5.615.700	99,92%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.590.900.370	1.534.423.576	96,45%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.539.960.370	1.484.910.326	96,43%
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	42.540.000	41.115.000	96,65%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	8.400.000	8.398.250	99,98%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.517.459	23.076.900	98,13%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	23.517.459	23.076.900	98,13%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	207.650.850	204.996.587	98,72%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	92.218.128	90.102.593	97,71%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	45.437.722	45.304.750	99,71%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.995.000	69.589.244	99,42%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438.539.427	374.258.432	85,34%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.019.427	163.875.812	73,48%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.520.000	210.382.620	95,13%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	277.358.109	275.534.222	99,34%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.918.109	100.709.090	99,79%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.460.000	9.360.000	98,94%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	166.980.000	165.465.132	99,09%

No	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.702.349.028	1.685.035.557	98,98%
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	167.572.387	166.405.800	99,30%
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	167.572.387	166.405.800	99,30%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	929.206.099	915.148.536	98,49%
	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	814.600	805.000	98,82%
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	10.351.180	10.322.500	99,72%
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	814.600	768.000	94,28%
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10.609.800	10.510.500	99,06%
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	226.952.304	226.257.595	99,69%
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	1.080.000	972.000	90,00%
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	93.843.806	93.810.000	99,96%
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	687.636	664.000	96,56%
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	551.808.824	538.941.441	97,67%
	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	32.243.349	32.097.500	99,55%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	182.613.580	181.567.623	99,43%
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	320.000	0	0%

No	Uraian	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	31.904.000	31.895.000	99,97%
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	4.562.000	4.529.500	99,29%
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	143.267.580	142.583.123	99,52%
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2.560.000	2.560.000	100%
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	422.956.962	421.913.598	99,75%
	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	88.688.000	88.515.334	99,81%
	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	200.000.000	199.455.072	99,73%
	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	134.268.962	133.943.192	99,76%

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja organisasi perangkat daerah. Sebagai bahan pertanggungjawaban kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan ini merupakan sarana introspeksi diri dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diharapkan dapat memberikan umpan balik dan sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana di masa mendatang.

Berdasarkan pada pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

1. Capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dari indikator Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah senilai 90 diperoleh dari hasil Analisa data yang dilakukan berdasarkan pengukuran unsur pelayanan melalui aplikasi e-SUKMA. Sedangkan indikator Indeks Ketahanan Daerah sebesar 0,72 diperoleh dari perumusan dan penilaian dari BPBD Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan 7 (tujuh) parameter indeks ketahanan daerah.
2. Pelaksanaan program/ kegiatan/ subkegiatan pada Badan Penanggulangan Daerah Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 menyerap anggaran sebesar 96,66%.

Dari hasil evaluasi kinerja BPBD tahun 2025, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih

- cermat serta revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pengadaan PNS, pembinaan, pendidikan dan pelatihan
 3. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana perkantoran perlu diprioritaskan.
 4. Meningkatkan koordinasi dengan Kecamatan serta Dinas terkait penanggulangan bencana.
 5. Meningkatkan pelayanan sosialisasi mitigasi bencana di Desa-deso dan Sekolah.
 6. Memaksimalkan pelayanan pusdalops sebagai pusat data dan informasi kebencanaan.

Pacitan, 20 Februari 2026



Kepala Pelaksana BPBD
Kabupaten Pacitan

ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19790308 199711 1 003

Lampiran

BERITA ACARA
PENYESUAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA TERHADAP RENSTRA

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
3. Kepala Bagian Organisasi




Dalam rangka penyelarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yaitu Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, terdapat beberapa hal yang perlu disepakati dan disesuaikan bersama yaitu:

1. Pencapaian kinerja pada Tahun 2024 sudah melebihi target Renstra Tahun 2025 maka target kinerja pada PK Tahun 2025 disesuaikan dari capaian kinerja 2024 minimal sama atau lebih tinggi.
2. Adanya kebijakan pimpinan untuk menaikkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Adapun rincian penyesuaian target sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TRAGET RENSTRA 2025	TARGET PK 2025
1	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM Perangkat Daerah	85,90	90

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
2	Dr. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Bappelitbangda	
3	WIDHI KUSUMANINGTYAS, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Organisasi	



BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Gedung Graha BNPB Jalan Pramuka Kav. 38, Jakarta Timur 13120

Telepon: 021-2982 7793, Faksimile: 021-2128 1200

Situs: <http://www.bnpb.go.id>

Nomor : B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

30 Januari 2026

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Penyampaian IKD 2025 dan IRB 2025 di Provinsi Jawa Timur

Yth. Gubernur Provinsi Jawa Timur

BNPB telah melakukan verifikasi dan finalisasi data Indeks Ketahanan Daerah (IKD) 2025 untuk penilaian Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 di tingkat kabupaten/kota melalui portal <https://inarisk.bnpb.go.id/admin>.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. BNPB memberikan apresiasi kepada Provinsi Jawa Timur atas konsistensinya dalam mendorong serta melakukan pendampingan kepada kabupaten/kota dalam pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD) setiap tahun;
2. BNPB juga menyampaikan apresiasi kepada BPBD kabupaten/kota yang telah melaksanakan penilaian IKD Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran;
3. BNPB telah melakukan finalisasi hasil IKD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sebagaimana terlampir. File final IKD Tahun 2025 dapat diakses melalui tautan: https://bit.ly/IKD_Provinsi_Jawa_Timur_2025_Final;
4. Nilai Indeks Risiko Bencana (IRB) Tahun 2025 dihitung dengan menggunakan salah satu input berupa nilai IKD Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengolahan tersebut, nilai IRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 sebesar **108,36** dan Nilai IKD rata-rata Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur sebesar **0,61**;
5. Nilai IRB pada tahun 2025 dihitung menggunakan *baseline* yang telah dimutakhirkan pada komponen bahaya dan komponen kerentanan, sehingga tidak untuk dibandingkan dengan hasil perhitungan IRB pada periode tahun 2015-2024;
6. Selanjutnya, BNPB menghimbau Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD Provinsi Jawa Timur untuk mengoordinasikan pengumpulan IKD kabupaten/kota serta melaksanakan pendampingan pada tahun 2026.

Demikian . . .

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

Tembusan:

1. Kepala BNPB (sebagai laporan);
2. Sekretaris Utama BNPB;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur;
4. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
5. Direktur Tata Ruang, Perkotaan, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri;
8. Plt. Kepala Biro Perencanaan, BNPB;
9. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Lampiran Surat

Nomor : B-44/BNPB/D-I/SS.01.03/1/2026

Tanggal : 30 Januari 2026

Nilai IKD 2025 dan IRB 2025 Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Timur

Kabupaten/Kota	IKD 2025	IRB 2025
Bangkalan	0,55	98,87
Banyuwangi	0,73	126,23
Blitar	0,65	130,22
Bojonegoro	0,60	97,35
Bondowoso	0,63	104,16
Gresik	0,64	119,66
Jember	0,59	161,94
Jombang	0,55	118,75
Kediri	0,69	103,85
Kota Batu	0,66	83,62
Kota Blitar	0,41	69,66
Kota Kediri	0,56	75,10
Kota Madiun	0,58	66,78
Kota Malang	0,60	67,67
Kota Mojokerto	0,29	116,30
Kota Pasuruan	0,51	90,49
Kota Probolinggo	0,52	110,56
Kota Surabaya	0,64	96,76
Lamongan	0,71	136,25
Lumajang	0,79	116,87
Madiun	0,53	114,33
Magetan	0,67	95,84
Malang	0,65	142,21
Mojokerto	0,73	97,23
Nganjuk	0,63	95,58
Ngawi	0,63	129,33
Pacitan	0,72	103,92
Pamekasan	0,72	86,50
Pasuruan	0,74	116,75
Ponorogo	0,56	111,46
Probolinggo	0,58	142,93
Sampang	0,61	89,87

Sidoarjo	0,52	91,68
Situbondo	0,70	138.43
Sumenep	0,56	112.67
Trenggalek	0,69	120.85
Tuban	0,56	104.80
Tulungagung	0,65	132.30

Deputi Bidang Sistem dan Strategi,



Raditya Jati

LAMPIRAN INDIKATOR SASARAN TAHUN

NO.	PRIORITAS	INDEKS PRIORITAS	INDEKS KAPASITAS DAERAH	TINGKAT KAPASITAS DAERAH
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,92	0,72	SEDANG
2	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,90		
3	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,92		
4	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0,78		
5	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,64		
6	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,61		
7	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,80		

LAMPIRAN INDIKATOR PROGRAM TAHUN 2025

PRIORITAS	SASARAN		INDIKATOR	RESPON (YA=1; TIDAK=0)	NILAI RESPON	TOTAL	INDEKS INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	NILAI KEPENTINGAN	NILAI INDIKATOR	INDEKS PRIORITAS	KERANGKA AKSI
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI, DIKLAT DAN LOGISTIK	INFORMASI DAN SOSIALISASI	14	Sarana penyampaian informasi kebencanaan yang menjangkau langsung masyarakat	1	2	4	4	4	0.02	0.07	0.92	Penerapan dan Peningkatan Fungsi Informasi Kebencanaan Daerah
				1	1							
				1	1							
				0	0							
		15	Sosialisasi pencegahan dan kesiapsiagaan bencana pada tiap-tiap kecamatan di wilayahnya	1	2	5	5	5	0.02	0.08		Membangun Partisipasi Aktif Masyarakat untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana di Lingkungannya
				1	1							
				1	1							
				1	1							
		16	Komunikasi bencana lintas lembaga minimal beranggotakan lembaga-lembaga dari sektor pemerintah, masyarakat mau pun dunia usaha	1	2	5	5	5	0.01	0.05		Komunikasi bencana lintas lembaga
				1	1							
				1	1							
				1	1							
		17	Pusdalops PB dengan fasilitas minimal mampu memberikan respon efektif untuk pelaksanaan peringatan dini dan penanganan masa krisis	1	2	5	5	5	0.01	0.07		Mengoptimalkan Fungsi dan Peran Pusdalops PB untuk Efektivitas Penanganan Darurat Bencana
				1	1							
				1	1							
				1	1							
	18	Sistem pendataan bencana yang terhubung dengan sistem pendataan bencana nasional	1	2	4	4	4	0.01	0.04	Pemanfaatan Sistem Pendataan Daerah yang Terintegrasi dengan Sistem Pendataan Nasional		
			1	1								
			1	1								
			0	0								
19	KAPASITAS (PENDIDIKAN DAN LATIHAN) Pelatihan dan sertifikasi penggunaan peralatan PB	1	2	4	4	4	0.02	0.08	Meningkatkan Kapasitas Respon Personil PB sesuai dengan Sertifikasi Penggunaan Peralatan PB			
		1	1									
		1	1									
		0	0									

	20	Penyelenggaraan Latihan (geladi) Kesiapsiagaan	1	2	5	5	5	0.05	0.23	PERALATAN DAN LOGISTIK	Meningkatkan Kapasitas Daerah melalui Penyelenggaraan Latihan Kesiapsiagaan					
			1	1												Peningkatan Kapabilitas Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
			1	1												Monitoring Ketersediaan dan Kesiapan Peralatan dan Logistik Kebencanaan Daerah
			1	1												
	21	Kajian kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1	2	5	5	5	0.01	0.07							
			1	1												
			1	1												
			1	1												
	22	Pengadaan kebutuhan peralatan dan logistik kebencanaan	1	2	5	5	5	0.01	0.07							
			1	1												
			1	1												
			1	1												
	23	Penyimpanan/pergudang Logistik PB	1	2	4	4	4	0.01	0.04							
			1	1												
			1	1												
			0	0												
	24	Pemeliharaan peralatan dan supply chain logistik yang diselenggarakan secara periodik	1	2	3	3	3	0.01	0.03							
			1	1												
			0	0												
			0	0												
	25	Tersedianya energi listrik untuk kebutuhan darurat	1	2	5	5	5	0.01	0.05							
			1	1												
			1	1												
			1	1												
	26	Kemampuan pemenuhan pangan daerah untuk kebutuhan darurat	1	2	5	5	5	0.01	0.05							
			1	1												
			1	1												
			1	1												

LAPORAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

BPBD KABUPATEN PACITAN
MELALUI *E-SUKMA JAWA TIMUR*

Juli - November
2025



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan 63514
Telp/Fax (0357) 886164, Website : bpbd.pacitankab.go.id
e-mail : bpbd.pacitan@gmail.com

KATA PENGANTAR

Salah satu indikasi pemerintahan yang baik (*good governmance*) adalah keikutsertaan (*participation*) masyarakat dalam menentukan kebijakan publik yang akan diambil oleh pemerintah sebagai fasilitator dan dinamisator. Partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam menilai atau memberikan umpan balik terhadap semua bentuk aplikasi atau penerapan kebijakan-kebijakan pelayanan publik yang diambil.

Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Esa akhirnya penyusunan laporan **Survei Kepuasan Masyarakat Semester II (Periode 1 Juli s.d 28 November) Tahun 2025** dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi gambaran persepsi masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Pacitan secara global. Selain itu juga dari tim penyusun mengharapkan agar rekomendasi yang dihasilkan dari laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan dan pembuatan kebijakan pimpinan. Sehingga kualitas pelayanan dapat lebih ditingkatkan dan kesenjangan antara harapan dan fakta di lapangan dapat diminalisir.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya kegiatan survey ini.

Pacitan, 28 November 2025

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Metode	3
BAB II PENGUMPULAN DATA SKM	
2.1 Pelaksanaan SKM	4
2.2 Metode Pengumpulan Data	4
2.3 Lokasi Pengumpulan Data	5
2.4 Waktu Pelaksanaan SKM	5
2.5 Penentuan Jumlah Responden	6
BAB III HASIL PENGOLAHAN DATA SKM	
3.1 Jumlah Responden SKM	7
3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat	7
BAB IV ANALISIS HASIL SKM	
4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan ...	9
4.2 Saran/Rekomendasi	9
4.3 Rencana Tindak Lanjut	10
4.4 Tren Nilai SKM	11
BAB V KESIMPULAN	
Kesimpulan	12
LAMPIRAN	
❖ Barcode	
❖ Kuesioner	
❖ Rekap Hasil Survei	
❖ Laporan Tindak Lanjut SKM pada periode sebelumnya	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamankan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan. Penilaian masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik akan diukur berdasarkan 11 (*sebelas*) unsur yang berkaitan dengan standar pelayanan, sarana prasarana, serta konsultasi pengaduan.

Untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu penyedia layanan publik di Kabupaten Pacitan, maka perlu diselenggarakan survei atau jajak pendapat tentang penilaian pengguna layanan publik terhadap pelayanan yang diberikan. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017, maka telah dilakukan pengukuran atas kepuasan masyarakat. Hasil SKM yang didapat merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat. Dengan elaborasi metode pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat, maka akan didapatkan kualitas data yang akurat dan komprehensif.

Hasil survei ini akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan masukan bagi penyelenggara layanan publik untuk terus-menerus melakukan perbaikan sehingga kualitas pelayanan prima dapat segera dicapai. Dengan tercapainya pelayanan prima maka harapan dan tuntutan masyarakat atas hak-hak mereka sebagai warga negara dapat terpenuhi.

1.2 Dasar Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan penanggulangan bencana yang telah diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

1.4 Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan survei ini melalui Aplikasi SukMa-e Jatim (Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik Jawa Timur). SukMa-e Jatim merupakan sistem yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik berbasis scan QR Code.

BAB II

PENGUMPULAN DATA SKM

2.1 Pelaksana SKM

Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan secara mandiri pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dengan membentuk tim pelaksana kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat. Tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah tim yang terdiri dari ASN yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Pelaksanaan SKM menggunakan aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik (SuKMa-e) dengan alamat website <https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=927> atau dapat discan melalui *barcode* yang dipasang di papan informasi dan di pintu masuk Kantor BPBD Pacitan serta dapat juga saat kegiatan berlangsung. Survei yang dilaksanakan melalui SuKMa-e menggunakan kuesioner yang terdiri dari pertanyaan yang mencakup unsur survei kepuasan masyarakat berdasarkan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, antara lain :

1. **Persyaratan** : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** : Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu penyelesaian** : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. **Produk spesifikasi jenis pelayanan** : Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi pelaksana** : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** : Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **Sarana dan prasarana** : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

2.3 Lokasi Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah setelah responden berhasil mengisi kuesioner. Data hasil pengisian kuesioner tersebut akan langsung terekam dan terlihat pada aplikasi SukMa-e dan direkap serta dilaporkan setiap satu semester.

2.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 6 (enam) bulan. Penyusunan indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 6 (enam) bulan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Waktu Pelaksanaan Survei

No.	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Hari Kerja
1.	Persiapan	Juli 2025	5
2.	Pengumpulan Data	Juli - November 2025	120
3.	Pengolahan Data dan Analisis Hasil	November 2025	5
4.	Penyusunan dan Pelaporan Hasil	November 2025	5

2.5 Penentuan Jumlah Responden

Dalam penentuan responden, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan memilih responden secara acak sesuai dengan penerima layanan penanggulangan bencana.

BAB III

HASIL PENGOLAHAN DATA SKM

3.1 Jumlah Responden SKM

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden pengguna/penerima layanan yang diperoleh pada periode Juli s/d November 2025 yaitu sebanyak 179 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1. Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	%
1.	Jenis Kelamin	Laki-laki	118	63 %
		Perempuan	70	37 %
Jumlah			188	

Tabel 3.2. Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No.	Karakteristik	Indikator	Jumlah	%
1.	Usia	17 s/d 30	73	39%
		31 s/d 50	89	47%
		>51	26	14%
Jumlah			188	

3.2 Indeks Kepuasan Masyarakat

Survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan menggunakan SuKMa-e memberikan kemudahan bagi unit kerja dalam mengukur tingkat kepuasan penerima layanan karena tidak perlu melakukan penghitungan secara manual. Pegawai yang ditugaskan sebagai administrator cukup melihat nilai survei kepuasan masyarakat melalui menu hasil survei yang tersedia. Setelah diterapkannya survei kepuasan masyarakat secara elektronik, periode bulan Juli s/d November 2025 didapatkan 188 (Seratus Delapan Puluh Delapan) responden yang mengisi kuesioner.

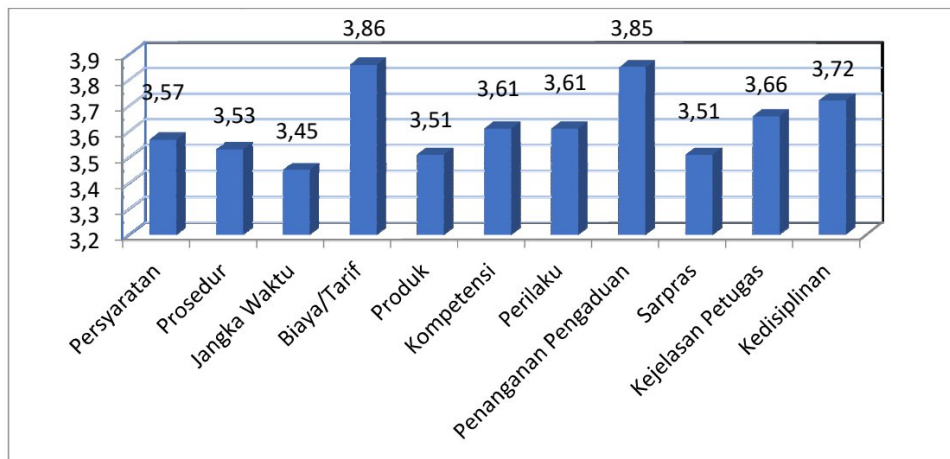
Nilai setiap unsur dan nilai survei kepuasan masyarakat dijelaskan pada table berikut :

Tabel 3.3 Detail Nilai SKM Per Unsur

	Nilai Unsur Pelayanan										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11
NRR/Unsur	3,57	3,53	3,45	3,86	3,51	3,61	3,61	3,85	3,51	3,66	3,72
JML NRR IKM TERTIMBA NG	3,60										
JML NRR IKM TERTIMBA NG x 25	90,00										

Berdasarkan tabel diatas, nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan adalah 90,00 (**Sangat Baik**).

Grafik 3.1 Grafik Nilai SKM Per Unsur



BAB IV

ANALISIS HASIL SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat diketahui bahwa :

1. Unsur jangka waktu mendapatkan nilai terendah yaitu 3,45. Selanjutnya unsur produk dan unsur sarana prasana yang mendapatkan nilai 3,51 adalah nilai terendah kedua.
2. Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu unsur biaya/tarif mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,86 dan berikutnya unsur penanganan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,85.

Permasalahan dilihat dari unsur pelayanan :

1. Unsur jangka waktu, produk pelayanan dan sarana prasarana dianggap masyarakat penerima layanan masih dirasakan masih kurang maksimal, hal ini bisa dikarenakan kondisi alam, ketersediaan anggaran, sarana prasarana dan SDM yang terbatas sehingga mempengaruhi jangka waktu serta output layanan yang diberikan kepada masyarakat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil rekapitulasi saran/rekomendasi yang masuk melalui media aplikasi SukMa-e, diperoleh beberapa saran serta rekomendasi dari masyarakat yang menjadi perhatian dan dapat digunakan dalam pembahasan rencana tindak lanjut yaitu sebagai berikut :

- “Ditingkatkan lagi untuk pelayanannya”
- “Semoga selalu semangat dan tanggap dalam menjalankan tugas”
- “Tetap menjalankan pelayanan yang baik, sopan dan ramah”
- “Kwalitas pelayanan terhadap korban bencana alam harus di tingkatkan karena ini menyangkut kebutuhan dasar manusia”

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Hasil analisa tersebut dalam rangka untuk perbaikan kualitas pelayan publik maupun pengambilan kebijakan dalam rangka pelayanan publik. Oleh karena itu, hasil analisa ini dibuatkan dan direncanakan tindak lanjut perbaikan. Rencana tindak lanjut perbaikan dilakukan dengan prioritas dimulai dari unsur yang paling rendah hasilnya.

Rencana yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti serta untuk perbaikan kualitas pelayanan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut

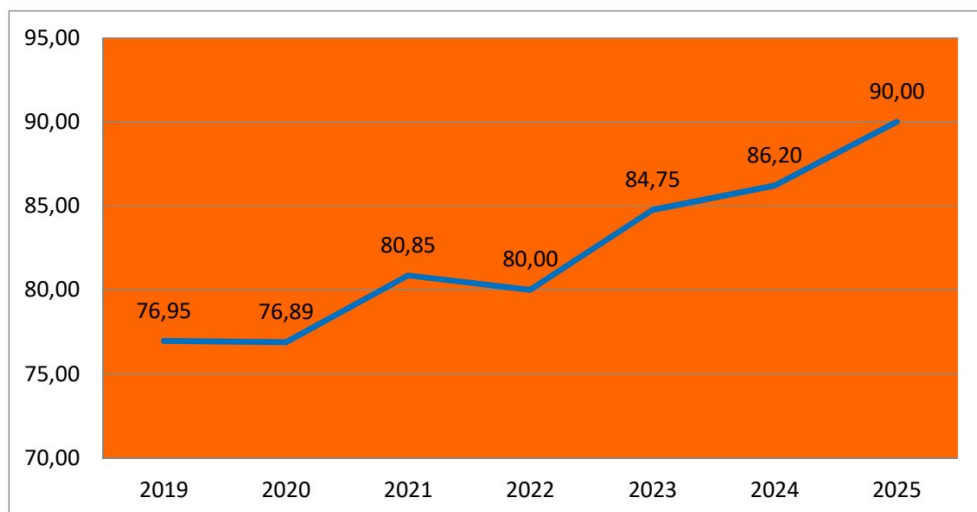
Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
Jangka waktu melakukan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi periodik untuk memastikan sesuai SOP - Meningkatkan disiplin dan budaya kerja 	Setiap waktu	Sekretariat dan Bidang
Produk pelayanan dianggap masyarakat masih kurang dalam pelayanannya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik - Melakukan peningkatan kapasitas SDM - Penyediaan sarana & prasarana penunjang kegiatan - Melakukan inovasi Disaster Learning Center 	Setiap waktu	Bidang
Sarana Prasarana dianggap masyarakat masih kurang dalam pelayanannya	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik - Melakukan pemeliharaan sarana & prasarana - Penyediaan sarana & prasarana penunjang kegiatan 	Setiap waktu	Sekretariat dan Bidang

4.4 Tren Nilai SKM

Untuk membandingkan indeks kinerja unit pelayanan secara berkala atau melihat perubahan tingkat kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan publik diperlukan survei secara periodik dan berkesinambungan. Hasil analisa survei dipergunakan untuk melakukan evaluasi kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan, sebagai bahan pengambilan kebijakan terkait pelayanan publik serta melihat kecenderungan (*tren*) layanan publik yang telah diberikan penyelenggara kepada masyarakat serta kinerja dari penyelenggara pelayanan publik.

Tren tingkat kepuasan penerima layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan dapat dilihat melalui grafik berikut :

Grafik 4.1. Grafik Tren Nilai SKM
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2019-2025



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sampai dengan semester II tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan.

BAB V

KESIMPULAN

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam periode Juli hingga November 2025, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pelayanan publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang **Sangat Baik** dengan nilai **IKM 90,00** dan menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sampai dengan Bulan November tahun 2025.
- Unsur pelayanan yang termasuk dua unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu unsur jangka waktu, produk layanan dan sarana prasarana.
- Sedangkan dua unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu biaya/tariff layanan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,86, dan penanganan pengaduan mendapatkan nilai tertinggi berikutnya yaitu 3,85.

Pacitan, 28 November 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Pacitan



ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19790308 199711 1 003

LAMPIRAN


1. Barcode

SCAN QR CODE UNTUK MEMULAI SURVEI
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
KABUPATEN PACITAN



<https://sukma.jatimprov.go.id/fe/survey?idUser=927>

2. Kuesioner



The image displays a grid of survey questionnaire screens. Each screen features the 'CEITAR OPTIMIS' logo and the title 'Survei Kepuasan Masyarakat'. The questions are presented with multiple-choice options and radio buttons. The final screen includes a 'Kotak Saran' (Suggestion Box) and a 'Form Saran' (Suggestion Form) with a 'Kirim' button. A 'Thank You For Survey' message is also visible.

3. Rekap Hasil Survei

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
1	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	EDI SANTOSA	43	Laki-Laki	081973209344
2	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	Rina lestari	27	Perempuan	081319363331
3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	Dwi Ratna Rahayu	47	Perempuan	085259502277
4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	3	Kusnul kotimah	31	Perempuan	083137993891
5	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	4	Risky Saputri	24	Perempuan	082132978494
6	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	Dinche Rike Ayunta	29	Perempuan	083834271623
7	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	AKNES YUNI SAPUTRI	26	Perempuan	087840888624
8	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Tini dwi lestari	42	Perempuan	08194051756
9	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Widarti	30	Perempuan	083156476804
10	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	Radista bety indriani	32	Perempuan	082231084675
11	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	Radista bety indriani	32	Perempuan	082231084675
12	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Rony Pangestu	28	Laki-Laki	087862266985
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rena	27	Perempuan	087821240613
14	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	Riyatno	47	Laki-Laki	081388615017
15	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Sindy Fatika Sari	19	Perempuan	081336560869
16	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Cindy Ananda	20	Perempuan	083856097862
17	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	Fitria Ermiani	23	Perempuan	085258687341
18	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Galang alfa diarna	21	Laki-Laki	087858305941
19	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Siska Farinda	21	Perempuan	083189832213
20	3	3	2	4	3	3	3	3	2	2	3	Dewi Puspita Sari	21	Perempuan	08816223613
21	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	3	Rieka Syahinda	21	Perempuan	083835334433
22	3	3	3	4	3	4	4	4	4	2	4	Hasna Frisca Redita	18	Perempuan	085608666018
23	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	4	Nur Mike Afista Prana Dewi	20	Perempuan	082264464060
24	3	3	2	3	3	3	4	4	3	4	4	Maya Zulistya Arrahmawati	18	Perempuan	083834884988
25	3	3	2	3	3	3	3	4	3	4	4	Laili Aprilia sari	19	Perempuan	082244120402

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s/d November 2025

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
26	3	3	2	2	3	3	3	1	3	3	3	Lusyiana	20	Perempuan	081919670726
27	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	Nadia	19	Perempuan	085335151403
28	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	Intan Ayu Maharani	19	Perempuan	083845648542
29	4	4	4	2	2	3	3	3	3	3	4	Muhammad Ikhwanul kazir	21	Laki-Laki	087863716256
30	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	Hesti Agustin	18	Perempuan	081391618894
31	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	1	Muhammad Wasrul Minalloh PGSD kelas d semester 2	18	Laki-Laki	081249394987
32	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	Nandita Felisa Putri	18	Perempuan	081359505143
33	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	Melni Alia	19	Perempuan	085338400544
34	3	3	2	2	2	3	3	1	3	3	3	Puput Febrianti	19	Perempuan	083843500236
35	3	3	2	4	3	3	3	4	3	3	3	mawar	19	Perempuan	083856173666
36	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	Nova	19	Perempuan	081381935022
37	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	Jesica Kunvianing Tyas	19	Perempuan	085546675476
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Muhammad Farhat Nugroho	21	Laki-Laki	08785831264
39	3	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	ARIS PRATAMA	23	Laki-Laki	083845697548
40	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	Andika	21	Laki-Laki	081803445340
41	3	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	Muhammad Alfian	21	Laki-Laki	0895413773890
42	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	FARDA ERSYA FANGARIQ	21	Laki-Laki	085230472230
43	3	3	3	4	3	3	3	4	2	3	4	Sabilul Huda	23	Laki-Laki	083848051018
44	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	Annisa Puspita Ningrum	20	Perempuan	082132977876
45	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Abdul Hamit Nurudin	23	Laki-Laki	083845502313
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Muhammad Fadly Said	21	Laki-Laki	6,28778E+12
47	4	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	Irfan Andi Saputra	23	Laki-Laki	083192859757
48	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Rizal	22	Laki-Laki	089635951644
49	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	Khoirul Huda	21	Laki-Laki	085336719233
50	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	EDI DWI KRISTANTO	25	Laki-Laki	087850370777

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s/d November 2025

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
51	3	3	2	4	3	3	3	1	2	1	3	Roni Andi Pramono	21	Laki-Laki	083166570197
52	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	RIZKY WIBOWO	21	Laki-Laki	089518392996
53	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	Ghiza Septian Ady Prasetya	21	Laki-Laki	085336038581
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Haryono	40	Laki-Laki	
55	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Edi Muriyanto	49	Laki-Laki	089511645237
56	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	Sumiati	38	Perempuan	081372456699
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sumarni	60	Perempuan	089522648799
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sri Rahayu	28	Perempuan	089521177645
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Adelia Dikasari	19	Perempuan	087758234988
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Eko Prasetyo	38	Laki-Laki	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Nadia Sintia Bella	19	Perempuan	087758634598
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Nadia Sintia Bella	19	Perempuan	087758634598
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Riyanto	45	Laki-Laki	081359816917
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Meliyana Saputri	22	Perempuan	082328604406
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Mohammad Naufal Affan	22	Laki-Laki	081575280029
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	Nayla Rizka Maulida	25	Perempuan	085725133675
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Siti aminah	53	Perempuan	082137956332
68	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	Tri Setyaningsih	25	Perempuan	087867190146
69	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	Winda Aulia	27	Perempuan	0895372427101
70	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	Dinda Nurhikmah	26	Perempuan	089618241284
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Joko Triyono	57	Laki-Laki	082169134579
72	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	Achmad Fajrin Kamali	24	Laki-Laki	087729321427
73	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	Dewi Malikha Ramadhani	30	Perempuan	0895377332751
74	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Nurudin	47	Laki-Laki	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Jarno	58	Laki-Laki	
76	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sugito Haris	59	Laki-Laki	

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s/d November 2025

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
77	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	Slamet Ari w	45	Laki-Laki	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Bambang	55	Laki-Laki	
79	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Eko Pambudi	38	Laki-Laki	
80	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Indah Ayu Kusuma W	29	Perempuan	082257633303
81	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Subur Pujiyanto	27	Laki-Laki	082338643057
82	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ulfianto Endro S	30	Laki-Laki	087751722825
83	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Miswanto	40	Laki-Laki	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Surahman	43	Laki-Laki	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Supriyono	47	Laki-Laki	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Juri	44	Laki-Laki	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sutadi	47	Laki-Laki	
88	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tunianto	49	Laki-Laki	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Miswan	51	Laki-Laki	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bibit	51	Laki-Laki	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rovik Alfiatu	25	Laki-Laki	
92	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bayu Tejo M	37	Laki-Laki	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Slamet Rosidin	50	Laki-Laki	
94	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	Suhirlah	44	Laki-Laki	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Windiasari	26	Perempuan	
96	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sutarti	47	Perempuan	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Gitun	49	Perempuan	
98	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Maruli sitompul	52	Laki-Laki	
99	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Hebri fareh	28	Laki-Laki	
100	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Bintang fauzan	25	Laki-Laki	
101	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Edy susanto	33	Laki-Laki	
102	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ika ratnawati	44	Perempuan	
103	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Iwan Budi Santoso	50	Laki-Laki	081232946600
104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Felik Septian H	31	Laki-Laki	082298897766

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s/d November 2025

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
105	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	Puji astuti	26	Perempuan	081332547969
106	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	Raya Ilham Syah Majiid	31	Laki-Laki	08561690508
107	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	4	ROQI HAMZAH	33	Laki-Laki	087760065005
108	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Galuh Faradhilah Yuni Astuti	31	Perempuan	087731133232
109	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Hendri	49	Laki-Laki	081234085101
110	4	3	3	4	4	4	3	4	3	4	4	SAIFUL ARIFIN	27	Laki-Laki	08228138186
111	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	SURYANTO JOKO LEGOWO	54	Laki-Laki	087758617217
112	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Yoni Kristanto	50	Laki-Laki	08125956162
113	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ety	33	Perempuan	085156106925
114	3	3	3	4	3	3	3	4	3	2	1	Ries ari wijaya	40	Laki-Laki	6,28594E+12
115	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	ZAKKI KISTOSO	50	Laki-Laki	085229255907
116	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	Rina Kurniasari	44	Perempuan	085235502727
117	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	Reza	40	Laki-Laki	087758434745
118	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	Wahyu Sidiq Prayogo	30	Laki-Laki	087758586219
119	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	Andi irfanto	36	Laki-Laki	082366600978
120	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	Warino	54	Laki-Laki	08174969906
121	4	4	3	4	3	3	3	4	3	4	3	Andi Dwi Wahyono	48	Laki-Laki	081330719533
122	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Hamdan Anis Marzuki	33	Laki-Laki	087866884291
123	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	UPIKA LARTININGSIH, SP, MM	47	Perempuan	0877384500489
124	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Marjuki	45	Laki-Laki	085233182003
125	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	Laksmi Wisnu Wardani	48	Perempuan	082323221485
126	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Mery Susanti	41	Perempuan	085239953395
127	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Reza	40	Laki-Laki	087758434745
128	3	3	3	4	3	3	3	4	2	4	4	Bari	53	Laki-Laki	0838574930573
129	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Lulis	38	Perempuan	
130	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	PATRAP SETYOKUNCORO	38	Laki-Laki	081803360356

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s/d November 2025

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
131	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	Didok Eko Widartomo	42	Laki-Laki	085231198182
132	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	Yongki Arganata	31	Laki-Laki	085962887361
133	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	wirawan	40	Laki-Laki	085287206295
134	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	Feri Andriawan	31	Laki-Laki	08124943466
135	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	Panji Sukarno	46	Laki-Laki	081335707072
136	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	NUROLIN	38	Laki-Laki	087858228444
137	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	SARAS DUPITA, S.H.	49	Laki-Laki	
138	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sarianto	56	Laki-Laki	082230707236
139	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	Rosidin	42	Laki-Laki	087766635288
140	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	Tika Dedy Prastyo	42	Laki-Laki	081329346990
141	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Edi Suprpto	51	Laki-Laki	08123410125
142	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Joko wahyudiyanto	57	Laki-Laki	081231195995
143	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Sri amadi	54	Laki-Laki	087702337699
144	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	RUSMAWATI	46	Perempuan	087758483107
145	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Sueb Tri Cahyono	56	Laki-Laki	085735208952
146	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	Didok Eko Widartomo	42	Laki-Laki	085231198182
147	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	Bagus NB	30	Laki-Laki	081946400678
148	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	Zulkarnain	44	Laki-Laki	087758371422
149	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	Windy W	28	Perempuan	085236361175
150	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	Ela Sukma	31	Perempuan	
151	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Heru ES	50	Laki-Laki	085331111345
152	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Prpto	40	Laki-Laki	081217010134
153	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Yulianto	37	Laki-Laki	
154	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Suprpto	48	Laki-Laki	
155	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Heri Susanto	57	Laki-Laki	
156	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Qosim	53	Laki-Laki	085694325832
157	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Ma'rifah	37	Perempuan	081225565994
158	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tatik	42	Perempuan	085845617377

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s/d November 2025

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
159	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Andi	35	Laki-Laki	085710089290
160	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Diki	34	Laki-Laki	085706524913
161	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Duryat	48	Laki-Laki	081384336087
162	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Guszali	37	Laki-Laki	085648225433
163	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Marwin	48	Laki-Laki	085748225433
164	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Miswandi	55	Laki-Laki	082335744584
165	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Prayit	55	Laki-Laki	085755713520
166	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Purnomo	52	Laki-Laki	081282640614
167	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rafa'i	27	Laki-Laki	085604637753
168	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rudi	27	Laki-Laki	085604637753
169	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Rudi	27	Laki-Laki	085859991985
170	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sanuji	50	Laki-Laki	081515631285
171	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Slamet	57	Laki-Laki	082225888054
172	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Sogol	47	Laki-Laki	082137061693
173	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Widodo	40	Laki-Laki	085335460316
174	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Winarsih	49	Perempuan	082231788446
175	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Yanto	55	Laki-Laki	08230226008
176	3	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	Lilis	45	Perempuan	
177	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Sukanto	56	Laki-Laki	081213947588
178	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Wahyudi	35	Laki-Laki	081249683446
179	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	ENDAH	48	Perempuan	081912198691
180	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	Yudi	53	Laki-Laki	081249683446
181	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	Wawan zahroni	50	Laki-Laki	082136914235
182	3	3	3	4	4	4	3	4	2	3	3	Rohmat	47	Laki-Laki	081979136675
183	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	Susi Setyaningsih	39	Perempuan	081976358655
184	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	Dwi Pujiati	40	Perempuan	085943529388
185	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	Wahyuni	45	Perempuan	081273316696
186	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Moh. Ali Zaenal	48	Laki-Laki	087736534321

Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Periode Juli s/d November 2025

NO. RESP	NILAI UNSUR PELAYANAN											NAMA	UMUR	JENIS KELAMIN	NOMOR TELEPON
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11				
187	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Tanti Yuliana	47	Perempuan	081913298645
188	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Subroto	47	Laki-Laki	082237569596
Nilai/Unsur	671	663	649	726	660	678	679	724	659	688	699				
NRR/Unsur	3.57	3.53	3.45	3.86	3.51	3.61	3.61	3.85	3.51	3.66	3.72				
NRR Tertimbang/Unsur	0.32	0.32	0.31	0.35	0.32	0.32	0.33	0.35	0.32	0.33	0.33				
JML NRR IKM TERTIMBANG	3.60														
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	90.00														



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Dewi Sartika No. 19 Pacitan 63514

Telp/Fax (0357) 886164, Website : bpb.d.pacitankab.go.id

e-mail : bpb.d.pacitan@gmail.com

